



RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

4.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu

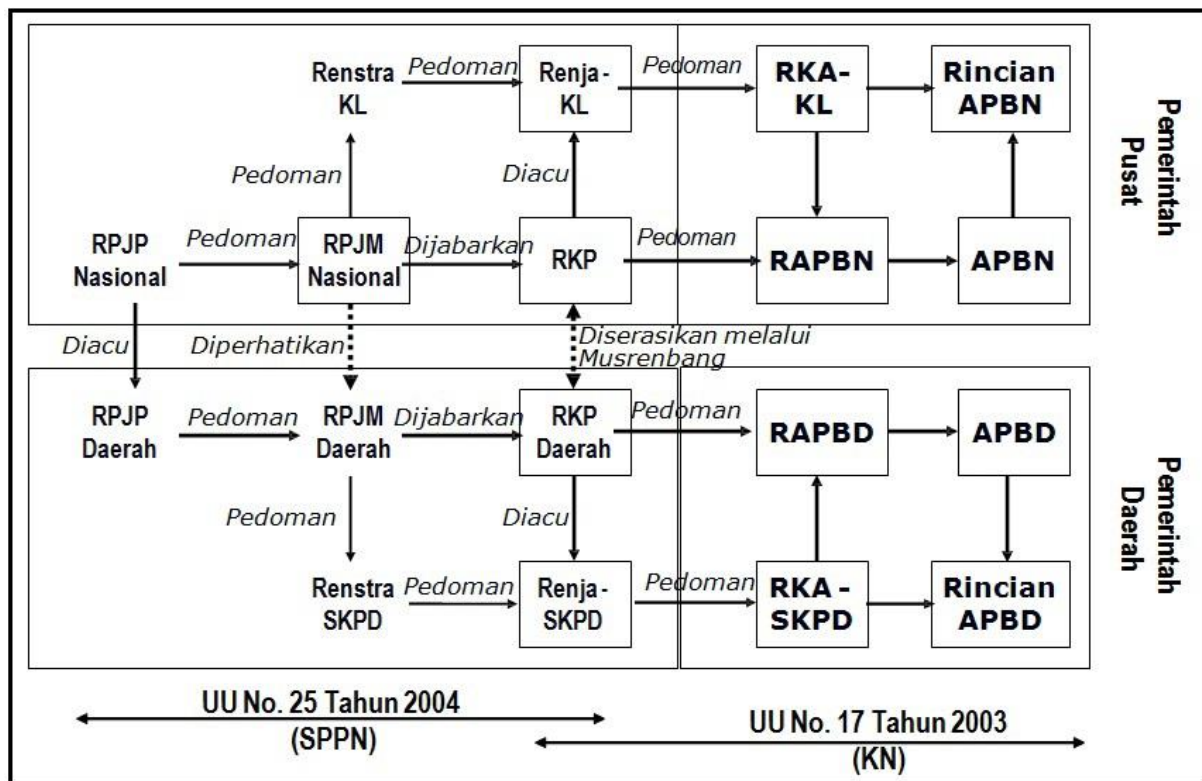
tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Srandakan. Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja kapanewon Srandakan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil

evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

4.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 34).

4.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

4.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

5.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023,
2. evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026 s.d Tahun 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	(11) = (10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.8	PROGRAM	Cakupan	100	100	100	100	100	100	100	100

	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	pembinaan kelembagaan adat dan tradisi								
2.22.8.5.07	Adat, seni, Tradisi,dan Lembaga budaya	Cakupan kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.8.5.07.06	Gelar budaya Jogja	Jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta	1	1	1	1	100	1	1	100
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100	100	100	100	100	100	100	100
6 4.01.4.2.0	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01 4.01.4.2.0	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	2	3	3	3	100	3	3	100
		Dokumen	4	4	4	4	100	4	4	100

		laporan pengendalia n dan evaluasi Dana Keistimewaa n per triwulan								
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	89	80,98	80,98	80,98	80,98	87	87	100
01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadmini strasian keuangan perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan	44	112	11	11	100	11	11	100
7.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	72	14	18	18	100	18	18	100
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	44	11	11	11	100	11	11	100
7.1.1.2.01.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	88	22	22 1	22	100	22	22	22

	bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	bulanan triwulanans mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan keuangan bulanan triwulanan semesteran SKPD								
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilita s kinerja instansi pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.1.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	16	16	4	4	100	4	4	4
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pener angan	16	16	13	13	100	13	13	13

		bangunan								
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16	23	29	29	100	32	32	32
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	16	24	18	18	100	9	9	9
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16	53300	24000	24000	100	19200	19200	19200
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	11	12	12	100	12	12	12
7.1.1.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48	12	12	12	100	12	12	12
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	96	24	955	955	100	528	528	528

		konsultasi SKPD								
		perjalanan dinas dalam daerah	100	192	192	192	100	84	84	84
		perjalanan dinas luar daerah	5	2	2	2	100	2	2	2
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2	2	2	2	100	1	1	1
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	4	1	1	1	100	1	1	1
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4	1	1	1	100	1	1	1
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	16	11	2	2	100	2	2	
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	98	85	85	85	85	85	86	100

		Instansi Pemerintah (AKIP)								
7.1.1.2.08.01	Penyediaan benda pos / materai	Materai	300	700	300	300	100	400	400	400
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi yang disediakan	48	12	12	12	100	12	12	12
		Jumlah laporan penyediaan sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12	12	12	12	100	12	12	12
		Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah	12	12	12	12	100	12	12	12
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	75	23	4	4	100	4	4	4
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa keamanan dan ketertiban	2	12	12	12	100	12	12	12

		kantor yang disediakan								
		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	16	12	12	12	100	12	12	12
		Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan lingkungan kantor yang disediakan	1	12	12	12	100	12	12	12
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendatraan dinas roda 4 jabatan yang dipelihar dan dibayarkan pajaaknya	2	2	2	2	100	2	2	2
		jumlah kendaraan perorangan	2	5	5	5	100	5	5	5

		dinas atau kendatraan dinas roda 2 jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaaknya								
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara direhabilitasi	2	2	2	2	100	2	2	2
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	28 dokumen	8	6	6	100	7	7	7
7.1.1.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	12	12	12	100	5	5	5
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan	94	100	92	92	92	92	92	100

		publik								
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100-	100	100	100	100	100
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah laporan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	16	4	4	4	100	4	4	4
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	28	14	7	7	100	7	7	7
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	laporan pelaksanaan nonperijinan	8	12 1	2	2	100	2	2	2

	Pelayanan Perizinan Non Usaha	pada urusan pemerintahan								
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	98	95	9	95	100	95	96	100
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan di desa	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	64	24	161	16	100	16	16	16
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan fasilitasi pengembang	19 laporan	0	4	4	100	41	4	4

		an usaha ekonomi masyarakat								
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentrama n dan Ketertiban Kapanewon	98	100	100	100	100	100	100	100
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentrama n dan Ketertiban Kapanewon	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan penanggulan gan bencana	5	2	2	2	100	2	2	2
		jumlah laporan kejadian trantibum di kapanewon	5	4	2	2	100	2	2	2
		jumlah laporan pelaksanaan upacara hari besar	12	12	12	12	100	12	12	12
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara								

		Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila ,pelaksanaan	296	12	74	74	100	37	37	37

[illegible]

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator penilaian AKIB ada yang belum terpenuhi karena adanya ASN yang pensiun
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adanya ASN yang pensiun sehingga anggaran menjadi sisa
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran BPJS Kesehatan yang tidak terbayarkan karena Non ASN sudah mempunyai Kartu Kesehatan

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Kerjasama yang baik antara stakeholder dan pelaku seni UMKM dan Kalurahan

	KEBUDAYAAN	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga budaya	Kerjasama yang baik antara stakeholder dan pelaku seni UMKM dan Kalurahan, forkompincam
	Gelar budaya Jogja	Kerjasama yang baik antara stakeholder dan pelakuseni UMKM dan Kalurahan, forkompincam
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Kerjasama yang baik antara stakeholder , kalurahan dan instansi terkait
	YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Kerjasama yang baik antara stakeholder, kalurahan dan instansi terkait
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Kerjasama yang baik antara stakeholder, kalurahan dan instansi terkait
		Pendampingan OPD terkait Bappeda, Bag. Organisasi dan Tapem.
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ROPK
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik antar jawatan, subbag dalam menyusun dokumen Adanya sistem Aplikasi Keuangan dalam proses penyusunan dokumen
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik antar jawatan, subbag dalam menyusun dokumen
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kerjasama yang baik antar jawatan, subbag dalam menyusun dokumen Evaluasi capaian kinerja dengan pengampu kegiatan terkait secara rutin dan pelaporan dalam sistem aplikasi
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Perencanaan dan penganggaran telah ditentukan sesuai dengan ROPK
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan dan penganggaran telah ditentukan sesuai dengan target yang ditentukan
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan dan penganggaran telah ditetapkan sesuai dengan target yang ditentukan
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Perencanaan dan penganggaran telah ditentukan sesuai dengan target pelaksanaan
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kerjasama dan dukungan dari kalurahan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan target waktu yang ditetapkan
	- Penyediaan Bahan Bacaan	Kerjasama dengan pihak ketiga

	dan Peraturan Perundang-undangan	penganggaran yang telah ditentukan
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kerjasama dan penganggaran yang telah ditentukan sesuai target
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan kebutuhan sesuai dengan target yang ditentukan
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan target dan kebutuhan yang ditentukan
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan target yang ditentukan
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan , penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan , penganggaran sesuai dengan target yang ditentukan
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penganggaran dan kebutuhan sesuai dengan target yang ditentukan
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penganggaran untuk kebutuhan jasa pelayanan sesuai dengan target yang ditentukan
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan , penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi dan kerjasama dengan kalurahan dalam memberikan pelayanan masyarakat
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penganggaran dan perencanaan yang telah ditentukan dan kerjasama dengan kalurahan
	- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan, penganggaran yang telah ditentukan sesuai target dan Koordinasi , kerjasama dengan instansi vertikal.
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Perencanaan, Penganggaran yang telah ditentukan sesuai target dan koordinasi
	- Pelaksanaan Urusan	Perencanaan penganggaran

	Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	sesuai dengan target dan dukungan dari kalurahan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari kalurahan,masyarakatTKPD dan intitusi lainnya.
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penganggaran kerjasama dan dukungan dari kalurahan, forkompincam
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penganggaran dukungan dan kerjasama , dari instansi vertikal/forakompincam
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penganggaran dan dukungan kalurahan maupun forkompincam
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kerjasama dan dukungan dari kalurahan dan forkompincam
	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penganggaran , perencanaan dan kerjasama ,dukungan dari kalurahan maupun forkompincam

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM berbasis IT.
2. Pengembangan, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
3. Intensifikasi, koordinasi dan upaya penanganan kemiskinan, stanting.
4. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan khususnya di Kawasan Pantai Selatan.
5. Peningkatan penguatan kelembagaan di tingkat Kalurahan.

5.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan kapanewon Srandakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Srandakan
Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	IKM Kapanewon	92,42	90	95,44	91	93	94	

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Srandakan Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Srandakan tidak ada yang tidak memenuhi target
2. IKU Kapanewon Srandakan yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. IKM

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan SDM, Sarana dan Prasarana, dan Motto pelayanan Legalitas, Empati, Setara, Transparan, Akuntabel, Responsip dan Inovatif.
- b. Adanya kerjasama pelayanan dengan Kalurahan
- c. Adanya kerjamasa yang terintegrasi dalam pelayanan publik baik dari tingkat Kalurahan ,Kapanewon maupun tingkat Kabupaten.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Srandakan Tahun 2023 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut

- 1. Adanya SDM yang handal, didukung dengan sarana prasarana teknologi IT yang memadai.
- 2. Penyusunan kesesuaian perencanaan program dan kegiatan.
- 3. Adanya Kerjasama yang baik dengan Kalurahan dan Instansi Lintas Sektor.

5.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Srandakan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Kekuatan	Kelemahan
Sumber Daya Aparatur yang semakin meningkat penguasaan IT	Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan masyarakat (komputer , laptop, printer, scanning)
Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan program kegiatan	Belum terpenuhinya sarana seragam identitas petugas pelayanan
Koordinasi antar intansi lintas sektor , dan Kalurahan berjalan dengan baik	Belum adanya forum konsultasi publik mayarakat pengguna layanan dengan ahli praktisi/akademisi, intansi terkait dan organisasi masyarakat dan media masa.

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Era keterbukaan informasi publik	Tuntutan adanya informasi dan pelayanan yang transparan, cepat, praktis, dan sistem layanan berbasis IT.
Keberadaan pantai dan kuliner di wilayah kecamatan srandakan	Giat Pokdarwis, UMKM
Pembangunan jembatan jalur lintas selatan/JJLS	Keamanan dan ketertiban yang meningkat
Pengembangan detinasi obyek wisata baru	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan 5M
	Menyiapkan SDM unggul, berkualitas dan berketranpilan
	Pengembangan sarana dan prasarana di obek wisata

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Konsolidasi koordinasi dengan forkompimkab (lintas sektor) untuk meningkatkan monitoring keamanan, ketertiban di kawasan jalur pantai selatan.
2. Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan program kegiatan
3. Peningkatan kualitas SDM berbasis IT

5.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Srandakan Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan		
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatakalsanaan	Kapanewon Srandakan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	95%	111.340.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatakalsanaan	Kapanewon Srandakan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistomewaan	100%	50.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan , dokumen laporan pengendalian dan evaluasi dna keistimewaan tingkat kecamatan	4 Dok. 3 Dok	50.000.000	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan , dokumen laporan pengendalian dan evaluasi dna keistimewaan tingkat kecamatan
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapane won Srandakan	Capaian kinerja peningkatan budaya pemerintahan	100%	50.000.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapanewon Srandakan	Tingkat Peningkatan Budaya Pemerintahan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								ASN di Kabupaten Bantul			
	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten bantul	Kapanewon Srandakan	Dokumen rencana aksi tahunan budaya SATRIYA , dokumen hasil internaalisasi budaya pemerintahan SATRIYA	1 dok	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA DI Kabupaten bantul	Kapanewon Srandakan	Dokumen rencana aksi tahunan budaya SATRIYA , dokumen hasil internaalisasi budaya pemerintahan SATRIYA	1 dok	50.000.000	V
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kapanewon Srandakan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	88 angka	3.424.522.894	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kapanewon Srandakan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	88 angka	3.424.522.894	V
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	18.000.000	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	18.000.000	V
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Dokumen perencanaan di kapanewon	6 dok	9.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Dokumen perencanaan di kapanewon	6 dok	9.000.000	V
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kapanewon Srandakan	Dokumen hasil evaluasi, dokumen keuangan	7 dok, 22 lap	9.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Kapanewon Srandakan	Dokumen hasil evaluasi, dokumen keuangan	7 dok, 22 lap	9.000.000	V

						realisasi kinerja SKPD					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadminis- trasian keuangan	100%	2.453.230.89 4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadminis- trasian keuangan	100%	2,453.230.89 4	v
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			perangkat daerah					perangkat daerah			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Srandakan	Gaji dan tunjangan ASN	14 kali	2.412.170.00 0	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Srandakan	Gaji dan tunjangan ASN	14 kali	2.412.170.00 0	v
	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Kapanewon Srandakan	Honorariu- m pengelolaa- n keuangan	112 ob	41.060.000	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Kapanewon Srandakan	Honorariu- m pengelolaa- n keuangan	112 ob	41.060.000	v
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	240.292.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	240.292.000	v
	Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga- n bangunan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat listrik	13 jenis	7.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang- an bangunan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat listrik	13 jenis	7.000.000	v
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat Tulis Kantor (ATK)	32 jenis	35.692.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat Tulis Kantor (ATK)	32 jenis	35.692.000	v
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kapanewon Srandakan	Bahan dan peralatan kebersihan	9 jenis	25.000.000	Penyediaan peralatan rumah	Kapanewon Srandakan	Bahan dan peralatan kebersihan	9 jenis	25.000.000	v

						tangga					
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kapanewon Srandakan	Penggandaan	54.000 lembar	17.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kapanewon Srandakan	Penggandaan	54.000 lembar	17.000.000	v
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kapanewon Srandakan	Surat Kabar	2 Jenis	3.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kapanewon Srandakan	Surat Kabar	2 Jenis	3.600.000	v
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kapanewon Srandakan	Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 lap	6.000.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kapanewon Srandakan	Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 lap	6.000.000	v
	Penyelenggaraan rapat koordinasi	Kapanewon Srandakan	Laporan hasil rapat,	24 lap	140.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi	Kapanewon Srandakan	Laporan hasil rapat,	24 lap	140.000.000	v
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan konsultasi SKPD		Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah			dan konsultasi SKPD		Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan penataan arsip	2 dok	12.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan penataan arsip	2 dok	12.000.000	v
	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Jumlah dokumen pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dok	1.000.000	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Jumlah dokumen pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dok	1.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100%	112.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100%	112.000.000	v

	Pengadaan mebel	Kapanewon Srandakan	Pengadaan mebel	1 unit	30.000.000	Pengadaan mebel	Kapanewon Srandakan	Pengadaan mebel	1 unit	30.000.000	v
	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Srandakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	4 jenis	82.000.000	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Srandakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	4 jenis	82.000.000	v
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	211.000.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	211.000.000	v
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kapanewon Srandakan	Materai dan benda pos	300 lembar	6.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kapanewon Srandakan	Materai dan benda pos	300 lembar	6.000.000	v
	Penyediaan jasa komunikasi	Kapanewon Srandakan	Pembayaran jasa pengelolaan	12 bulan	45.000.000	Penyediaan jasa komunikasi	Kapanewon Srandakan	Pembayaran jasa pengelolaan	12 bulan	45.000.000	v
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	sumber daya air dan listrik		sampah, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening telepon			sumber daya air dan listrik		sampah, pembayara n rekening listrik, pembayara n rekening telepon			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Perbaikan peralatan dan perlengkapn kantor	15 jenis	20.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Perbaikan peralatan dan perlengkapn kantor	15 jenis	20.000.000	v

	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kapanewon Srandakan	Laporan keamanan dan ketertiban kantor, laporan kebersihan lingkungan kantor, Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon, Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan tenaga non ASN	12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 60 ob	140.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kapanewon Srandakan	Laporan keamanan dan ketertiban kantor, laporan kebersihan lingkungan kantor, Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon, Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan tenaga non ASN	12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 60 ob	140.000.000	v
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	390.000.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	390.000.000	v
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan n kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan, Pemeliharaan n kendaraan roda 4, pajak kendaraan	7 unit 3 unit	170.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan n kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan , Pemeliharaan n kendaraan roda 4, pajak kendaraan	7 unit 3 unit	170.000.000	v
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan n gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	120.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan n gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	120.000.000	v
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	2 unit	33.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	2 unit	33.000.000	
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kapanewon Srandakan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	93 %	51.500.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kapanewon Srandakan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	93 %	51.500.000	v
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan n kapanewon	100%	42.500.000	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan n kapanewon	100%	42.500.000	v
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintuntahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kapanewon Srandakan	Laporan koordinasi Forkompimka p	4 dok	22.500.000	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintuntahan dengan perangkat daerah dan	Kapanewon Srandakan	Laporan koordinasi Forkompimka p	4 dok	22.500.000	v

						instansi vertical terkait					
	Peningkatan efetifitas kegiatan pemerintahan di	Kapanewon Srandakan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon	7 dok	20.000.000	Peningkatan efetifitas kegiatan	Kapanewon Srandakan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon	7 dok	20.000.000	v
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	tingkat kecamatan		kepada kalurahan			pemerintahan di tingkat kecamatan		kepada kalurahan			
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	92 %	9.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	92 %	9.000.000	v
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kapanewon Srandakan	Laporan survey kepuasan (SKM) Masyarakat yang dilayani	2 dok 15000orang	10.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kapanewon Srandakan	Laporan survey kepuasan (SKM) Masyarakat yang dilayani	2 dok 15000orang	10.000.000	v
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kapanewon Srandakan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	96%	171.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kapanewon Srandakan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	96%	171.000.000	v

	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	95%	115.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	95%	115.000.000	v
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kapanewon Srandakan	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 dok	19.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kapanewon Srandakan	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1dok	19.000.000	v
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan bidang sosial	16 dok	96.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan bidang sosial	16 dok	96.000.000	v
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan	95%	56.000.000	Pemberdayaan lembaga	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan	95%	56.000.000	v
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	tingkat kecamatan,		lembaga kemasyarakatan			kemasyarakatan tingkat kecamatan,		lembaga kemasyarakatan			
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kapanewon Srandakan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	4 dok	56.000.000	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kapanewon Srandakan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	4 dok	56.000.000	v

5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kapanewon Srandakan	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	97%	152.250.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kapanewon Srandakan	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	97%	152.250.000	v
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	95%	152.250.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	95%	152.250.000	v
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon, Laporan pelaksanaan upacara hari besar, Laporan penanggulangan bencana	2 dok 12 dok 2 dok	152.250.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon, Laporan pelaksanaan upacara hari besar, Laporan penanggulangan bencana	2 dok 12 dok 2 dok	152.250.000	v
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Kapanewon Srandakan	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	11.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Kapanewon Srandakan	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	11.000.000	v
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan	100 %	11.000.000	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan	100 %	11.000.000	v

5.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

6.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
- PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
- PN 5: Melanjtkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Srandakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, akurat transparan dan akuntabel di dukung dengan teknologi layanan berbasis IT.
2. Meningkatkan percepatan penanganan penurunan angka stunting.
3. Meningkatkan promosi daya saing produksi unggulan UMKM sebagai andalan setempat melalui Inovasi “ONTEL SIUMI” (Online Terlengkap Promosi UMKM).
4. Meningkatkan pengelolaan pembangunan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur kelembagaan yang ada di masyarakat.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Forkompinkap untuk melaksanakan monitoring ketertiban, keamanan lingkungan dan wilayah Kawasan Jalur Pantai Selatan.
6. Meningkatkan peran Pokdarwis dan pengembangan destinasi wisata di Kawasan Pantai Selatan.

6.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah ”Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah” dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemerataan kualitas infrastruktur.
3. Peningkatan SDM berdaya saing.
4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi.
6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasan industri piyungan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kapanewon srandakan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon srandakan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja kapanewon Srandakan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
				Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN	Meningkatkan pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM	92,42	95.44	95.44	93

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Srandakan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Srandakan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bantul

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KAPANEWON SRANDAKANKAB. BANTUL

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
															Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
						Kapanewon Srandakan						3.603.315.429,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00						
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00						
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	-			100 persen	100.000.000,00						
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	-			100 persen	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	M p b U	

	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja												
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	M p b U	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						40.000.000,00						
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						40.000.000,00						
2	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdisa kelembagaan	-			100 persen	40.000.000,00						
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas	-			100 persen	40.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	K d K	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan												

						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	K d K		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.463.315.429,00							
	7	01				KECAMATAN					3.463.315.429,00							
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-			88 persen	3.128.910.429,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			88 persen	7.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	3.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	49.260.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	3.600.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Admiistrasi Kepegawaian Perangkat daerah	-			88 persen	500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	14.113.168,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					4 Paket	6.792.080,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	5.400.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24 Laporan	67.222.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	4.600.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-			88 persen	25.650.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0	0,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	25.650.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			88 persen	175.180.464,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatanPemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	49.200.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	14.760.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	111.220.464,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	-			88 persen	154.522.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	134.470.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20.052.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatanPemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-			4 Dokumen	51.900.000,00					

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-			4 Dokumen	42.900.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	K d K
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	22.900.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	K d K
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	K d K

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			93 persen	9.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan												
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	9.000.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	A K	
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat	-			97 persen	125.855.000,00						
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	-			97 persen	86.855.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatanPemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	M K d K	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 Lembaga Kemasyarakatan	16.855.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	70.000.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-			95 persen	39.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat												

							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	39.000.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	-			97 persen	23.100.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	-			97 persen	23.100.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	23.100.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatanPemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika		
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-			100 persen	133.550.000,00						

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-			100 persen	133.550.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	M K d K	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				74 Orang	133.550.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good- governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	M K d K		
	J U M L A H											3.603.315.429,00						

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Panewu Srandakan
SARJIMAN, S.IP, ME
NIP. 197105031992031010